

BAB IV

PENUTUP

Bab ini merupakan muara dari seluruh rangkaian penelitian yang telah membedah pengaruh *Executive Order No. 13769* terhadap pembentukan persepsi publik Amerika Serikat terhadap pengungsi Suriah. Melalui kacamata teori sekuritisasi dari *Copenhagen School*, penelitian ini telah membuktikan bahwa kebijakan negara bukanlah sekadar instrumen hukum administratif yang statis, melainkan sebuah arsitek diskursif yang mampu meredefinisi identitas manusia serta mengubah arah empati sebuah bangsa secara fundamental.

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis mendalam yang telah dijabarkan pada bab-bab sebelumnya, penelitian ini menarik kesimpulan bahwa dampak paling fundamental dari *Executive Order No. 13769* adalah terjadinya transformasi radikal dalam persepsi publik Amerika Serikat terhadap pengungsi Suriah. Sentimen masyarakat yang sebelumnya berpotensi didominasi oleh empati kemanusiaan terhadap korban perang, terindikasi kuat telah direayasa menjadi kecurigaan dan ketakutan melalui proses sekuritisasi yang terstruktur. Pemerintahan Presiden Donald Trump tidak semata-mata menyandarkan kebijakannya pada risiko faktual, melainkan memanfaatkannya sebagai tindak tutur (*speech act*) untuk merombak kognisi sosial warganya. Melalui repetisi narasi ini, administrasi Trump berupaya memisahkan status ontologis pengungsi Suriah dari realitas mereka sebagai "pencari suaka" dan

merekonstruksinya secara diskursif menjadi ancaman eksistensial (*existential threat*) yang diklaim dapat menghancurkan kedaulatan dan keamanan nasional (*referent object*).

Perubahan persepsi publik ini semakin dilembagakan ketika logika darurat yang dibangun lewat jargon seperti "*extreme vetting*" digunakan untuk menjustifikasi penerapan tindakan luar biasa (*emergency measures*). Penangguhan program pengungsi secara masif dan pelarangan masuk tanpa batas waktu bagi warga Suriah secara perlahan menggeser parameter moral di tengah masyarakat. Tindakan yang secara sadar menanggihkan prosedur kemanusiaan normal dan mengesampingkan prinsip non-refoulement tersebut perlahan mulai dimaklumi oleh sebagian publik sebagai sebuah keniscayaan defensif demi melayani agenda nasionalisme proteksionis (*America First*), terlepas dari nihilnya korelasi langsung antara pengungsi Suriah dengan aksi terorisme fatal pasca-9/11 di tanah Amerika.

Lebih lanjut, keberhasilan negara dalam mengubah persepsi ini sangat didorong oleh intervensi media massa yang bertindak sebagai "ruang gema" (*echo chamber*). Media massa terindikasi mempercepat mutasi kognitif di tengah masyarakat dengan mengamplifikasi stigma negatif melalui produksi metafora destruktif seperti "Kuda Troya" dan "Invasi". Dramatisasi visual dan pelabelan pengungsi sebagai "Liyen" (*The Other*) yang berhimpitan dengan sentimen Islamofobia ini, secara psikologis sangat efektif dalam memicu alarm kewaspadaan massal. Kondisi inilah yang secara sistematis meminggirkan realitas penderitaan para pengungsi di benak publik, menggantikannya dengan fokus yang nyaris eksklusif pada narasi risiko keamanan.

Puncak dari keberhasilan rekayasa persepsi ini dievaluasi melalui metrik penerimaan audiens (*audience acceptance*). Data opini publik membuktikan bahwa pergeseran persepsi tidak terjadi secara seragam, melainkan memicu polarisasi partisan yang ekstrem. Meskipun secara agregat nasional kebijakan pembatasan ini mendapat penolakan (sebesar 59%), proses sekuritisasi ini tetap mencapai tujuannya karena berhasil mengunci dan merekonstruksi persepsi target audiens utamanya. Dengan memenangkan validasi dan dukungan solid dari basis konstituen konservatif dan Republikan, aktor penyekuritisasi memperoleh legitimasi politik yang cukup untuk mempertahankan kebijakan eksklusif tersebut. Pergeseran kognitif di mana rasa iba berhasil ditekan oleh paranoia dan ketakutan ini menegaskan bahwa Executive Order No. 13769 berkontribusi signifikan dalam meredefinisi persepsi jati diri Amerika Serikat: dari sebuah "Negara Imigran" yang inklusif menjadi "Negara Benteng" (*Fortress America*) yang melegitimasi eksklusif moral atas nama keamanan pada kurun waktu 2017-2021.

4.2. Saran

Berangkat dari temuan-temuan krusial di atas, penulis mengajukan beberapa saran yang diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan studi hubungan internasional maupun praktik kebijakan publik di masa depan. Bagi kalangan akademisi dan peneliti selanjutnya, penelitian ini memberikan landasan mengenai betapa kuatnya pengaruh narasi elit dalam membentuk persepsi publik. Oleh karena itu, disarankan untuk melakukan studi komparatif mengenai

mekanisme "kontra-sekuritisasi" (*de-securitization*) yang dilakukan oleh aktor non-negara atau masyarakat sipil guna mengembalikan isu pengungsi ke ranah kemanusiaan murni. Penelitian mengenai dampak psikologis jangka panjang dari kebijakan dehumanisasi ini terhadap komunitas pengungsi yang sudah berada di negara penerima juga menjadi topik yang sangat mendesak untuk dieksplorasi lebih dalam.

Bagi pemerintah dan pembuat kebijakan, ditekankan pentingnya perumusan kebijakan keamanan nasional yang berbasis pada data intelijen dan realitas empiris yang terukur (*evidence-based policy*), bukan berdasarkan sentimen identitas atau narasi populis yang bersifat diskriminatif. Penggunaan instrumen hukum luar biasa di masa depan harus tetap memperhatikan standar hak asasi manusia internasional dan prinsip keadilan prosedural agar tidak merusak standar moral demokrasi yang menjadi pilar bangsa. Selain itu, diperlukan mekanisme pengawasan yang lebih kuat terhadap diskresi eksekutif dalam ranah imigrasi untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak dasar individu atas nama keamanan nasional.

Terakhir, bagi media massa dan publik luas, terdapat tanggung jawab moral untuk menyajikan informasi yang berimbang dan menjauhi dramatisasi yang memicu xenofobia. Media massa diharapkan kembali pada fungsinya sebagai penyeimbang kekuasaan yang kritis terhadap narasi keamanan yang tidak berdasar. Sementara itu, publik diharapkan untuk terus meningkatkan literasi digital dan kemampuan berpikir kritis agar tidak mudah terkolonisasi oleh narasi ketakutan yang sengaja diproduksi demi agenda politik tertentu. Menumbuhkan kembali

empati berbasis pengetahuan faktual adalah kunci utama untuk menjaga kohesi sosial dan kemanusiaan di tengah dunia yang kian terfragmentasi dan terpolarisasi.